

**STRATEGI PEMERINTAH ETHIOPIA DALAM MEMANFAATKAN
PROGRAM *COUNTRY PROGRAMMING FRAMEWORK* (CPF) FAO**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

OLEH :

SRI RESKY MULYADI

E061181512

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH ETHIOPIA DALAM MEMANFAATKAN
PROGRAM *COUNTRY PROGRAMMING FRAMEWORK* (CPF) FAO**

Disusun dan diajukan oleh

SRI RESKY MULYADI

E061181512

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : STRATEGI PEMERINTAH ETHIOPIA DALAM
MEMANFAATKAN PROGRAM *COUNTRY PROGRAMMING
FRAMEWORK* (CPF) FAO

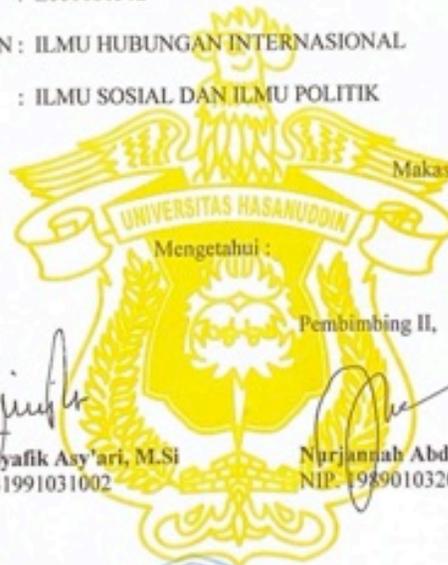
N A M A : SRI RESKY MUYADI

N I M : E061181512

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

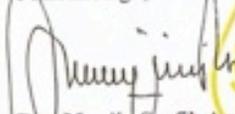
FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 31 Maret 2023



Mengetahui :

Pembimbing I,


Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si
NIP. 196304211991031002

Pembimbing II,


Nurjannah Abdullah, S.IP, MA
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :

Ketua Departemen Hubungan Internasional,


Prof. H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : STRATEGI PEMERINTAH ETHIOPIA DALAM
MEMANFAATKAN PROGRAM *COUNTRY PROGRAMMING*
FRAMEWORK (CPF) FAO

N A M A : SRI RESKY MUYADI

N I M : E061181512

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin-Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis, 9 Maret 2023.

Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D.

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Resky Mulyadi

NIM : E061181512

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **"Strategi Pemerintah Ethiopia Dalam Memanfaatkan Program *Country Programming Framework (CPF)* FAO"** merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan skripsi ini adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Makassar, 16 April 2023



Sri Resky Mulyadi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul “Strategi Pemerintah Ethiopia Dalam Memanfaatkan Program *Country Programming Framework* (CPF) FAO”. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan segala kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi ini diharapkan mampu memberi pengetahuan baru kepada para pembaca. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan yang ada. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi menyempurnakan penulisan skripsi ini. Selama melakukan penelitian ini, penulis juga menerima bantuan, dukungan, bimbingan hingga doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak dan Mama penulis yang sangat penulis cintai, **H. Mulyadi Mustamu, SH dan Hj. Yaisa, S.Pd.** Terima kasih sudah membesarkan, merawat, dan mendidik Cece selama ini sehingga bisa tumbuh dan berkembang dengan

baik. Terima kasih karena selalu sabar sama Cece. Terima kasih karena selalu support apapun yang Cece lakukan. Maafkan kalau Cece belum bisa jadi apa yang Bapak Mama mau, semoga Bapak Mama sehat selalu supaya Cece bisa segera bahagiakan Bapak Mama. Terima kasih karena selalu jadi sumber keuangan Cece hehehehe♥. Mungkin Cece tidak bisa bilang langsung sama Bapak Mama, tapi kalau bagian ini dibaca Cece cuma mau bilang Cece sayang sekali sama Bapak Mama♥♥♥

2. Untuk saudara-saudara penulis yang tercinta, **Emilia Yolanda Mulyadi & Andi Muh Imam Ilyas, Efendi Al-Qadri Mulyadi & Mutmainnah Muamalia Alamsyah, dan Shoffiah Intan Mulyadi**. Nda tau mau bilang apa intinya *I Love U All* hehe.
3. Untuk ponakan-ponakanku yang tercinta, yaitu **Abid dan Alina**. Terima kasih sudah menjadi sumber semangat untuk tante Cece. Tante Cece love u both, jangan cepat besar nah.
4. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak **Prof. H. Darwis, MA., Ph.D.**
5. Bapak **Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si** sebagai Dosen Pembimbing I dan **Ibu Nurjannah Abdullah, S.IP., MA** sebagai Dosen Pembimbing II Terima kasih atas segala bimbingan substansi dan materil, masukan, serta motivasi yang diberikan sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

6. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional khususnya **Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA., Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si., Bapak Bama Andika Putra, S.IP., MIR., Bapak Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP., M.Si., MIR., Bapak Agussalim, S.IP., MIRAP., Bapak Aswin Baharuddin, S.IP., MA., Bapak Burhanuddin, S.IP., M.Si., Bapak Dr. H. Adi Suryadi Culla, MA., Bapak Ishaq Rahman, S.IP., M.Si., Bapak Muh. Ashry Sallatu, S.IP., M.Si., Ibu Seniwati, S.Sos., M.Hum., Ph.D., Bapak Muh.Nasir Badu, S.Sos., M.Hum., Ph.D., dan Bapak (alm) Drs. Aspiannor Masrie, M.Si.** Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, pengalaman yang sangat berharga selama penulis menjadi mahasiswa di Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin.
7. Para Staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional yakni **Bu Rahma, Pak Ridho, dan Kak Salni.** Terima kasih atas semua bantuannya. Terima kasih karena tidak pernah lelah melayani dan memenuhi segala macam permintaan kami dengan maksimal.
8. Kepada saudaraku **Dewi Sukma Rahmadani. Z, Hardian Novianto, dan Nabel Rizkia Salsabila Muis.** Terima kasih karena selalu mau dengar keluhan Cece. Terima kasih karena selalu ada. Terima kasih karena mau berteman sama Cece. Terima kasih selalu mau temani Cece yang takut pergi kemana-mana sendiri. Terima kasih karena selalu mau direpotkan. Terima

Kasih karena selalu baik. Jangan bosan-bosan berteman sama Cece nah. Ayo berteman sampai nanti-nanti♥.

9. Kepada sepupu rasa saudaraku, **Uci, Cia, Cica, Caca, dan Citi**. Terima kasih karena selalu jadi tempat cerita. Terima kasih karena selalu “Ayo” kalo diajak. Sayangki’
10. Seluruh teman-teman **Reforma 2018**, khususnya **kak Isty, mba Dinzo, Lau, Matryd, kak Farah, mba Afni, Raisha, Anbar, Kiko, Uul, kak Ica, Mario, kak Fadhil, Ayyub, Izha, Naswan, Acca, Daffa, Yudi, Yusril, Wingky, Inci, Virda, kak Nahda, Dela, Kiky, Bobi, Ahmad, Abdillah, dan Nabilah**. Terima kasih karena mau berteman sama Cece. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang teman-teman beri untuk Cece. Terima kasih untuk pengalaman luar biasa. Semoga sukseski’ semua
11. *Last but not least*, terima kasih untuk diri sendiri karena sudah sampai di titik ini, karena sudah berjuang sejauh ini. Terima kasih karena tidak pernah menyerah walaupun harus banyak menangis, ndapapa menangis kalau memang berat tapi nanti harus bangkit lagi. Cece pasti BISA.

Makassar, 16 April 2023

Penulis

ABSTRAKSI

Sri Resky Mulyadi, (E061181512), “Strategi Pemerintah Ethiopia dalam Memanfaatkan Program *Country Programming Framework* (CPF) FAO” dibawah bimbingan Drs. Munjin Syafik Asy’ari, M.Si selaku pembimbing I dan Nurjannah Abdullah, S.IP. MA selaku pembimbing II pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Ethiopia dalam memanfaatkan program *Country Programming Framework* FAO serta Hambatan dan pencapaian Ethiopia dalam mengimplementasikan program *Country Programming Framework* FAO. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa telaah pustaka yang bersumber dari laporan, jurnal, dokumen resmi, artikel, dan situs resmi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Ethiopia dalam memanfaatkan program *Country Programming Framework* FAO adalah dengan melibatkan instansi pemerintah Ethiopia dalam mengimplementasikan program CPF-FAO yaitu *Crop Production, Livestock and Fisheries Production* dan *Sustainable Natural Resource Management*. Adapun hambatan dalam mengimplementasikan program *Country Programming Framework* FAO adalah masalah populasi yang semakin meningkat, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara FAO dan pemerintah Ethiopia, serta integrasi program FAO yang belum sepenuhnya terintegrasikan berbasis pasar. Adapun pencapaian dari strategi Ethiopia dalam mengimplementasikan program *Country Programming Framework* FAO adalah tercapainya target 2mobilisasi sumber daya *Country Programming Framework*, banyaknya proyek pengembangan yang belum terselesaikan di lapangan serta integrasi program FAO yang belum sepenuhnya terintegrasikan berbasis pasar.

Kata Kunci: CPF (*Country Programming Framework*), Ethiopia, FAO

ABSTRACT

Sri Resky Mulyadi, (E061181512), "Ethiopian Government Strategy in Utilizing FAO Country Programming Framework (CPF) Program" under the guidance of **Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si** as supervisor I and **Nurjannah Abdullah, S.IP. MA** as supervisor II at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to determine how Ethiopia's strategy in utilizing the FAO Country Programming Framework program as well as Ethiopia's obstacles and achievements in implementing the FAO Country Programming Framework program. The type of research in this study is qualitative research, with data collection techniques in the form of literature review sourced from reports, journals, official documents, articles, and official websites related to this research

The results of this study show that Ethiopia's strategy in utilizing FAO's Country Programming Framework program is to involve Ethiopian government agencies in implementing CPF-FAO programs, namely Crop Production, Livestock and Fisheries Production and Sustainable Natural Resource Management. The obstacles in implementing FAO's Country Programming Framework program are the problem of increasing population, lack of communication and coordination between FAO and the Ethiopian government, and the integration of FAO programs that have not been fully integrated market-based. The achievements of Ethiopia's strategy in implementing the FAO Country Programming Framework program are the achievement of the Country Programming Framework resource mobilization target, the number of unfinished development projects in the field and the integration of FAO programs that have not been fully integrated based on the market

Keywords: CPF (*Country Programming Framework*), Ethiopia, FAO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
1. Konsep Kerja sama Internasional	10
2. Konsep Food Security	12
3. Tabel Operasionalisasi Variabel	15
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Teknik Pengumpulan Data	15
3. Teknik Analisis Data	16
4. Metode Penulisan	16
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kerja Sama Internasional	17
B. <i>Food Security</i>	22
C. Penelitian Terdahulu	34

BAB III	37
GAMBARAN UMUM	37
A. Krisis Pangan Ethiopia	37
B. Kebijakan Ethiopia dalam Menangani Krisis Pangan	47
C. Program Country Programming Framework FAO di Ethiopia	59
BAB IV	74
HASIL DAN PEMBAHASAN	74
A. Strategi Ethiopia dalam memanfaatkan program Country Programming Framework FAO	74
B. Hambatan dan pencapaian strategi Ethiopia dalam mengimplementasikan program Country Programming Framework FAO	98
BAB V	107
PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 1 PDB dan Tingkat Pertumbuhan Pertanian di Ethiopia 1981-1997	38
Gambar 3 2 Jumlah Total dan Perkiraan Populasi Ethiopia	42
Gambar 3 3 Bagan Skema Inisiatif CRGE	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1 .1 Operasionalisasi Variabel	15
Tabel 3 1 Estimasi Produksi Pangan, Populasi serta Jumlah Bantuan Krisis Pangan.....	41
Tabel 3 2 Estimasi Produksi Pangan dan Populasi Ethiopia	41
Tabel 3 3 Project Crop Production	66
Tabel 3 4 Project Livestock & Fisheries	67
Tabel 3 5 Project kolaborasi Crop & Livestock	69
Tabel 3 6 Project Sustainable Natural Resources Management	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 1990an, Sekitar 27 juta jiwa di benua Afrika menghadapi krisis pangan akut. Tingkat krisis pangan paling akut terjadi di Ethiopia, Kenya, Somalia, Djibouti, Sudan, Sudan Selatan, serta Uganda (Hospita, 2019). Perwakilan Ghana dalam forum *World Food Council* mengatakan bahwa ancaman terbesar di kawasan Afrika bukanlah perang dan nuklir melainkan ketidakmampuan masyarakat di Afrika untuk mencukupi kebutuhan pangannya. Perubahan iklim yang terjadi di beberapa negara menjadi salah satu penyebab kenaikan harga produk hasil pertanian dan jelas hal tersebut memberikan dampak yang menyengsarakan petani dalam mendapatkan akses pangan (Defrina, 2005).

Ethiopia sendiri belum terbebas dari masalah kelaparan sejak awal tahun 1970an. Hal tersebut berangkat dari dampak kekeringan hebat yang mempengaruhi sebagian besar negara di Sahel Afrika. Pada awal tahun 1980an, sejumlah orang di Tigray, Eritrea tengah, Welo, sebagian dari bagian Gonder, dan Shewa mulai merasakan dampak dari masalah kelaparan tersebut. Pertengahan tahun 1984 dampak kekeringan pun semakin memburuk dan mempengaruhi sebagian besar wilayah Ethiopia Utara. Kegagalan panen dan pertempuran di Eritrea dan sekitarnya menghambat perjalanan pasokan bantuan (Ekaputri, 2020).

Kondisi kelaparan di Ethiopia yang diperburuk dengan perang pada tahun 1984 hingga 1985 ini sebenarnya dapat diambil sebagai sebuah pelajaran berharga. Hal ini tidak lepas dari rute pasokan yang melalui Ethiopia atau Eritrea maupun Sudan membuat ribuan orang bisa kelaparan seperti yang digambarkan oleh PBB sebagai sebuah situasi kelaparan yang terburuk di dunia dalam beberapa dekade terakhir (Plaut, 2021).

Selain itu, Ethiopia juga mengalami kekeringan hebat akibat wabah El Nino yang mempengaruhi sebagian besar wilayah Pastoral Selatan pada tahun 2015-2016. Kekeringan yang parah terjadi di bagian tenggara dan menyebabkan kerawanan pangan yang meluas. Sebagian besar penduduk Ethiopia bergantung pada pertanian dan ternak untuk mata pencaharian, namun kekeringan yang terjadi selama bertahun-tahun mengakibatkan gagalnya panen dan kematian ternak yang meluas (Ekaputri, 2020).

Secara geografis, Ethiopia berbatasan dengan Eritrea di sebelah Utara, Kenya di sebelah Selatan, Djibouti dan Somalia di sebelah Timur, serta Sudan dan Sudan Selatan di sebelah Barat. Pada umumnya, Ethiopia merupakan dataran rendah, padang rumput dan dataran semi-gurun dan termasuk kedalam negara yang tidak memiliki laut atau *landlocked* dengan jumlah populasi terbesar di dunia. (Indonesia, 2018) serta mayoritas mata pencaharian terbesar di Ethiopia adalah sektor pertanian dimana sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian Ethiopia dan memberikan kontribusi PDB negara tersebut sebesar 46,2% untuk tahun 2012 serta menyerap lebih dari 80% tenaga kerja dimana

sejak *Growth and Transformation Plan II* atau *GTP II* diimplementasikan, pemerintah Ethiopia secara bertahap beralih menjadi negara agraris menjadi negara industrialisasi. Alhasil, pada tahun 2017 PBD Ethiopia didominasi oleh 3 sektor yaitu Pertanian 34,12%, Industri 22,9%, serta Jasa 36,92% (Indonesia, 2018).

Menyoal permasalahan yang dialami oleh Ethiopia sejalan dengan fenomena internasional kontemporer yang tidak hanya berdasar pada keamanan tradisional seperti perang antar negara-negara, tetapi telah berkembang menjadi fenomena-fenomena yang lebih *soft* seperti kemiskinan, perubahan iklim, krisis pengungsi dan juga krisis pangan. Krisis pangan sebenarnya telah menjadi fenomena internasional yang telah berlangsung sejak lama, namun dalam beberapa dekade terakhir krisis pangan semakin meningkat di beberapa negara di dunia sehingga masyarakat internasional berupaya untuk menginisiasi dengan membuat organisasi internasional yang berfokus untuk mengatasi krisis pangan di dunia dan dampak yang ditimbulkannya. Adapun organisasi internasional yang berfokus untuk menangani krisis pangan di dunia adalah *Food and Agriculture Organization* (FAO).

Food and Agriculture Organization (FAO) merupakan salah satu organisasi internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bekerjasama dengan negara maju dan negara berkembang untuk mengatasi masalah kelaparan dan pertanian di dunia. Adapun tujuan utama FAO adalah membantu negara-negara anggotanya dalam memenuhi kebutuhan pangan serta

meningkatkan ketahanan pangan dengan cara meningkatkan efisiensi dan produk hasil pangan dan pertanian, memperbaiki kondisi penduduk pedesaan, menunjang perekonomian dunia dan membebaskan manusia dari kelaparan (Indah.P, 2015).

Selain itu, FAO juga bertugas untuk membantu negara-negara dalam memperbaiki praktek pertanian, kelautan, kehutanan, serta memastikan terpenuhinya nutrisi yang dibutuhkan untuk masyarakat negara anggotanya. Bahkan saat ini organisasi tersebut telah memfokuskan perhatiannya pada pengembangan daerah di pedesaan dimana saat ini terdapat 70% penduduk dunia yang masih mengalami kemiskinan dan kelaparan (FAO, 2022).

Dalam melakukan tugasnya, FAO memiliki lembaga-lembaga yang bertugas untuk menentukan program-program yang akan dilakukan serta mengurus masalah administrasi. FAO terdiri dari delapan bagian, yaitu *Administration and Finance Agriculture, Fisheries, Economic and Social, Forestry, Sustainable Development and Technical Cooperation*, dan *General Affairs and Information* (Indah.P, 2015).

Ada lima langkah yang dilakukan FAO dalam pembentukannya, yakni, mengakhiri malnutrisi, memastikan adanya keamanan ekonomi, mengurangi kemiskinan di pedesaan, melindungi peternakan keluarga, dan menghadapi tantangan yang dihadapi dalam mencapai *zero hunger*. Kelima langkah FAO ini dapat dijawab dengan melalui 3 kata kunci, yakni *knowledge, sharing, dan action*. Staf FAO juga terdiri dari berbagai ahli, mulai dari agronomi, spesialis

kehutanan, perikanan dan sumber daya hewan, ahli gizi, sosiolog, antropolog, ilmuwan dan manajemen informasi, hukum, komunikasi, dan ahli statistic (FAO, 2023)..

Pembentukan organisasi ini tidak lepas dari tujuan untuk menghilangkan kelaparan dan meningkatkan nutrisi serta standar hidup dengan jalan melakukan upaya peningkatan produktivitas pertanian (FAO, 2022). Dengan kata lain, prioritas utama FAO adalah mendorong terjadinya *sustainable agriculture and rural development*. Hal ini merupakan strategi jangka panjang untuk meningkatkan produksi makanan dan keamanan pangan (*Food Security*) dengan memelihara dan mengelola sumber daya alam (Indah.P, 2015).

Selaras dengan hal tersebut, Ethiopia sendiri merupakan anggota FAO sejak tahun 1948. Ketika FAO Ethiopia dibentuk, FAO telah menjadi partner pembangunan aktif pada *Government of Ethiopia* (GoE) dalam menerapkan program-program untuk meningkatkan gizi dan ketahanan pangan penduduk Ethiopia serta menanggapi keadaan darurat di bidang pertanian dan pangan (Ekaputri, 2020). Hal ini dikarenakan berdasarkan penilaian *UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) pada pertengahan Juni 2021 lalu, bahwa 350.000 orang menghadapi bencana kelaparan. Bahkan, dengan bantuan kemanusiaan, setidaknya satu dari lima kepala keluarga pada daerah tersebut sangat kekurangan makanan dan kebutuhan dasar lainnya, dimana kelaparan, kematian, dan kemelaratan terlihat jelas (Plaut, 2021)

Untuk menanggulangi krisis pangan di Ethiopia, *Government of Ethiopia* (GoE) melakukan beberapa upaya serta membentuk *Policy Investment Framework* atau PIF yang berlaku untuk periode 2010-2020 dan telah digunakan sebagai acuan dalam pembangunan-pembangunan yang mengidentifikasi berbagai bidang prioritas dan memperkirakan pembiayaan yang perlu disediakan oleh pemerintah dan mitra pembangunannya (Ekaputri, 2020). Kebijakan *Policy Investment Framework* (PIF) Ethiopia ini memiliki tujuan untuk berkontribusi pada Ethiopia mencapai status berpenghasilan menengah pada tahun 2025. Kebijakan PIF juga memiliki tujuan pembangunan yaitu untuk meningkatkan pendapatan pedesaan dan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan (Mafa Chipeta, 2015).

Policy Investment Framework atau PIF yang berlaku untuk periode 2010-2020 ini menjadi kerangka kerja strategis dalam merencanakan dan memprioritaskan pertumbuhan dan pembangunan pertanian di Ethiopia. Program ini dirancang untuk mengoperasionalkan CAADP Compact yang ditandatangani oleh pemerintah dan mitra pembangunannya. PIF ini menjadi peta pembangunan yang diupayakan oleh pemerintah Ethiopia untuk melihat dan mengidentifikasi bidang-bidang yang menjadi prioritas untuk investasi dan memperkirakan biaya yang perlu disiapkan oleh pemerintah dan mitra pembangunannya (MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, 2010)..

FAO Ethiopia pun fokus mendukung tujuan strategis *Policy Investment Framework* (PIF) Ethiopia dengan mendukung berbagai upaya yang dilakukan

oleh GoE dalam mengatasi kelaparan serta kekurangan gizi, dan secara konsisten akan terus memberikan bantuan pada Ethiopia demi mencapai tujuan utama yakni membebaskan Ethiopia dari krisis pangan serta menciptakan situasi dimana pertanian lebih berkontribusi secara signifikan pada peningkatan mata pencaharian para petani dan kehidupan petani kecil, pemuda, perempuan, anak-anak, serta masyarakat terpinggirkan lainnya secara khusus (Ekaputri, 2020).

Ada empat tema utama dalam pelaksanaan PIF ini dengan tujuan strategisnya masing-masing, yakni :

1. Mencapai peningkatan produktivitas dan produksi pertanian yang berkelanjutan
2. Mempercepat komersialisasi pertanian dan agroindustry
3. Mengurangi degradasi dan meningkatkan produktivitas sumber daya alam
4. Mencapai ketahanan pangan universal dan melindungi rumah tangga rentan dari bencana alam (Mafa Chipeta, 2015).

FAO membuat *program Country Programming Framework* atau CPF dari hasil konsultasi yang diadakan dengan Kementerian Pertanian dan Sumber Daya Alam, Kementerian Kehutanan, Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Sumber Daya Peternakan dan Perikanan Pemerintah Ethiopia, serta para ahli FAO dari unit teknis terkait. Di bawah CPF, program-program FAO akan diintegrasikan ke dalam empat tim tematik, yaitu pada bidang tanaman, ternak, manajemen sumber daya alam dan ketahanan pangan serta nutrisi dan DRM. Dalam *Country Programming Framework* (CPF) sendiri menetapkan tiga

bidang prioritas, yaitu *Agricultural Productivity and Competitiveness*, *Sustainable Natural Resources Development and Management*, dan *Improved Food and Nutrition Security* (Ekaputri, 2020), Kemudian diimplementasikan ke tiga prioritas area yaitu *Crop production*, *Livestock and Fisheries* dan *Sustainable Natural Resource Management*. Namun, untuk mengefektifkan pelaksanaan program FAO tersebut maka Pemerintah Ethiopia merancang berbagai upaya untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan pelaksanaan program tersebut di negaranya dalam penanganan krisis pangan yang ada.

Oleh karena itu penulis ingin menganalisis lebih dalam mengenai penelitian yang berjudul “Strategi Pemerintah Ethiopia dalam Memanfaatkan Program *Country Programming Framework* (CPF) FAO”

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Adapun batasan pada penelitian ini adalah terkait strategi Ethiopia dalam memanfaatkan program *Country Programming Framework* (CPF) yang meliputi tiga bidang, yaitu *Agricultural Productivity and Competitiveness*, *Sustainable Natural Resources Development and Management*, dan *Improved Food and Nutrition Security* yang kemudian diimplementasikan kedalam tiga area prioritas yaitu *Crop production*, *Livestock and Fisheries* dan *Sustainable Natural Resource Management*. di Ethiopia dalam rentang waktu 5 tahun 2016-2020. Oleh karena itu, penulis merumuskan rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Ethiopia dalam memanfaatkan program *Country Programming Framework* FAO?
2. Bagaimana hambatan dan pencapaian strategi Ethiopia dalam mengimplementasikan program *Country Programming Framework* FAO?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui :

1. Strategi Ethiopia dalam memanfaatkan program *Country Programming Framework* FAO
2. Hambatan dan pencapaian Ethiopia dalam mengimplementasikan program *Country Programming Framework* FAO.

Adapun kegunaan penelitian ini ialah:

1. Diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis yang diharapkan mampu menambah wawasan bagi pembaca terkait strategi Ethiopia dalam memanfaatkan program *Country Programming Framework* FAO
2. Mampu memberikan bahan pertimbangan kepada akademisi sebagai pembanding bagi mahasiswa Departemen Ilmu Hubungan Internasional maupun mahasiswa departemen lain yang ingin meneliti dan mengkaji terkait strategi Ethiopia dalam memanfaatkan program *Country Programming Framework* FAO.

D. Kerangka Konseptual

1. Konsep Kerja sama Internasional

Dalam melakukan hubungan internasional, negara-negara saling melakukan interaksi satu sama lain. Interaksi tersebut berbentuk seperti konflik, perang, maupun kerja sama dalam organisasi internasional. pasca terjadinya perang dingin, hubungan negara-negara lebih erat dengan melakukan kerja sama internasional (Haryanto, 2015).

Kerja sama internasional merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepentingan negara yang akan melakukan kerja sama. Kerja sama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interpendensi dan semakin kompleksnya kehidupan manusia dalam dinamika internasional (Bagaskara, 2018).

Dari pengertian di atas, kerja sama internasional dapat dilihat sebagai wadah atau alat yang dapat menjadi opsi suatu negara dalam mencapai atau mewujudkan kepentingan yang dimiliki oleh setiap aktor. Dalam hal ini, kepentingan yang dicapai oleh aktor yang terlibat dalam kerja sama dapat dicapai tanpa menimbulkan konflik antara pihak yang satu dan lainnya. Kerja sama internasional yang dilakukan oleh para aktor baik negara maupun non negara ini dapat menjadi jawaban dari permasalahan kompleks yang dihadapi oleh dunia internasional saat ini.

K.J Holsti mendefinisikan kerja sama internasional sebagai

berikut :

1. Pandangan bahwa dua atau lebih tujuan, kepentingan, atau nilai saling berkaitan dan dapat menghasilkan sesuatu atau dapat dipenuhi oleh semua pihak yang akan bekerjasama
2. Pandangan atau harapan dari negara yang akan bekerjasama bahwa kebijakan yang ditetapkan akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingannya
3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara negara yang akan bekerjasama dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang akan dilakukan untuk melaksanakan persetujuan
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Haryanto, 2015).

Menurut Matthew Paterson, politik lingkungan internasional dalam kerjasama internasional merupakan ketergantungan antar aktor yang akan melakukan kerja sama untuk menghadapi ancaman yang dianggap akan membahayakan kepentingan nasional. Dengan adanya persamaan tujuan dan kepentingan bersama merupakan unsur yang wajib dalam kerja sama meskipun terkadang terdapat benturan antar masing-masing kepentingan negara, namun selama tujuan yang telah dibuat bersama dapat disepakati, kerja sama yang dijalankan dapat terus berjalan (Injaya, 2013).

Dari pandangan yang diberikan oleh Matthew ini, kerjasama internasional dapat dilihat sebagai akibat dari adanya hubungan saling ketergantungan antar aktor di dunia internasional. Di sisi lain, kerjasama internasional ini juga dapat terjadi dengan adanya pertimbangan ancaman yang dihadapi bersama-sama. Hal ini menjadikan poin utama yang harus dimiliki dalam setiap kerjasama

internasional yang dibangun oleh aktor internasional adalah adanya kepentingan bersama yang dibawa dalam kerja sama tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian kerja sama tersebut, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pandangan mengenai kerja sama internasional menurut Bagaskara. Konsep kerjasama internasional ini akan digunakan untuk melihat bagaimana kerja sama yang dilakukan oleh FAO dan Ethiopia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Ethiopia dan kepentingan-kepentingan yang dibawa dalam kerja sama ini, baik dari Ethiopia maupun FAO. Selain itu, kerjasama ini juga akan digunakan untuk melihat bagaimana interdependensi FAO dan Ethiopia, terutama dalam mengatasi krisis pangan yang terjadi di Ethiopia.

2. Konsep *Food Security*

Istilah ketahanan pangan atau *Food Security* muncul karena adanya krisis pangan dan kelaparan. Istilah ketahanan pangan pertama kali digunakan oleh PBB pada tahun 1971 untuk membebaskan dunia terutama negara berkembang dari krisis suplai makanan pokok dan krisis produksi. Ketahanan pangan pada saat itu berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok dan membebaskan daerah dari krisis pangan.

Menurut PBB, Ketahanan pangan adalah ketersediaan untuk menghindari kekurangan pangan akut pada saat gagal panen yang meluas atau bencana lainnya. Definisi tersebut akhirnya disempurnakan kembali

pada *International Conference of Nutrition* 1992 yang disepakati oleh pimpinan negara anggota PBB dengan menyatakan bahwa ketersediaan pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang baik dalam jumlah maupun mutu pada setiap saat untuk hidup, aktif, dan produktif (Pieris, 2015).

Berdasarkan pengertian yang dipaparkan di atas, ketahanan pangan dapat diartikan kondisi dimana adanya ketersediaan bahan makanan yang mencukupi kebutuhan setiap individu yang ada pada sebuah daerah atau wilayah, termasuk dalam kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Ketersediaan tersebut harus memiliki jumlah yang sesuai dengan kualitas dan mutu yang sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ada.

FAO mendefinisikan ketahanan pangan sebagai situasi dimana semua penduduk mempunyai akses baik secara fisik maupun ekonomi, untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarga dan rumah tangga tidak beresiko untuk mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Selaras dengan definisi dari FAO, menurut Mercy Cops, ketahanan pangan merupakan keadaan ketika semua orang pada setiap saat memiliki akses fisik, ekonomi, dan sosial terhadap kecukupan pangan, bergizi, dan aman untuk kebutuhan gizi yang sesuai dengan selernya untuk hidup sehat dan produktif (Dewi & Ginting, 2012).

Pada masa krisis di awal tahun 1970-an, konsep ketahanan pangan awalnya hanya berfokus untuk memastikan adanya ketersediaan pangan dan stabilitas harga bahan makanan pokok yang disebabkan oleh volatilitas harga

komoditas pertanian yang ekstrim dan turbulensi di pasar mata uang dan energy. Pada pertengahan tahun 1990, seiring dengan berkembangnya istilah ketahanan pangan, mulai juga berkembang istilah ketahanan gizi serta ketahanan gizi dan pangan. Hal inilah yang kemudian menjadikan ketahanan pangan dianggap sebagai bagian dari ketahanan gizi dan pangan (Berry, 2019).

Ketahanan pangan minimal mengandung unsur pokok yaitu ketersediaan pangan, stabilitas harga pangan, dan aksesibilitas masyarakat. Apabila salah satu dari unsur tersebut tidak dapat terpenuhi, suatu negara tidak dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan yang tersedia bisa dikatakan cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut tidak merata maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh. Aspek distribusi pangan sampai ke pelosok pedesaan adalah hal yang sangat penting dalam upaya memperkuat strategi ketahanan pangan (Dewi & Ginting, 2012).

Berdasarkan pengertian ketahanan pangan yang dijabarkan di atas, penulis akan menggunakan pendapat FAO mengenai ketahanan pangan Untuk menjadi pisau analisis dalam penelitian ini. Konsep ini akan digunakan untuk melihat bagaimana kondisi yang ada di Ethiopia, termasuk akses untuk mendapatkan bahan pangan di negara tersebut. Dalam hal ini, kondisi ini merujuk pada bagaimana akses memperoleh pangan di setiap individu dalam keluarga yang ada di Ethiopia dalam memperoleh pangan.

3. Tabel Operasionalisasi Variabel

Tabel 1 .1 Operasionalisasi Variabel

VARIABEL		KONSEP	INDIKATOR
Dependen	Strategi Pemerintah Ethiopia	Kerjasama Internasional	Strategi Pemerintah Ethiopia Dalam Memanfaatkan Program CPF FAO
Independen	Program Country Programming Framework (CPF) FAO	Food Security	Hambatan dan Capaian Pemerintah Ethiopia Dalam Mengimplementasikan Program CPF FAO

Sumber: Diolah oleh penulis, 2022

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif yang berdasar pada sumber - sumber kajian pustaka dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif agar dapat mendeskripsikan secara luas dan mendalam tentang Strategi Ethiopia dalam memanfaatkan program *Country Programming Framework* (CPF) FAO.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu, kajian pustaka dengan mengeksplorasi dan mereview berbagai literature seperti buku, jurnal artikel, yang terkait dengan tema penelitian, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer dalam penelitian seperti buku,

jurnal, artikel dan situs pendukung lainnya. Adapun data yang dibutuhkan ialah data yang berkaitan tentang Strategi Ethiopia dalam memanfaatkan program *Country Programming Framework* (CPF) FAO.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis ialah teknik analisis kualitatif. Teknik ini menganalisis permasalahan yang digambarkan berdasarkan fakta-fakta temuan dengan menghubungkan fakta tersebut dengan fakta yang lainnya sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang tepat.

4. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah pola deduktif yang menggambarkan suatu masalah secara umum kemudian menarik kesimpulan yang spesifik dalam menganalisis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerja Sama Internasional

Kerjasama merupakan sebuah istilah yang tidak bias dilepaskan dalam pembahasan hubungan internasional. Kerjasama sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sebuah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang baik itu lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama (KBBI Online, 2022). Dari pengertian ini, kerja sama dapat dimaknai sebagai sebuah kegiatan yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan tertentu yang dikejar oleh masing-masing pihak.

Dalam hubungan internasional, dikenal konsep kerjasama internasional. Menurut Nanang Pamuji Mugasejati kerja sama dapat terjadi karena adanya kebijakan yang diambil oleh suatu negara dengan hanya mempertimbangkan kepentingan negara sendiri dan tidak mempertimbangkan kepentingan negara lain, dimana kondisi ini dianggap oleh negara lain sebagai sebuah bentuk hambatan untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional mereka, akan tetapi dalam kondisi tersebut ada upaya untuk melakukan penyesuaian kebijakan antara kedua belah pihak sehingga kebijakan masing-masing negara menjadi lebih kompatibel.

Menurut Nanang Pamuji Mugasejati:

Kerja sama internasional sebagai sebuah kebijakan yang diambil oleh suatu negara yang dianggap oleh negara lain sebagai fasilitator pencapaian tujuan mereka, sebagai hasil koordinasi kebijakan, karena koordinasi kebijakan merupakan sebuah proses berinteraksi politik dalam berbagai bentuk, mediasi, negosiasi, dan *bargaining* (Mugasejati, 2006).

Yanuar Ikbar juga memberikan definisi kerja sama internasional, yakni:

Kerja sama internasional merupakan bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan bersama negara-negara di dunia. Kerja sama ini terdiri dari berbagai bidang, yakni social, politik, pertahanan keamanan, ekonomi, dan kebudayaan, dengan berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara yang terlibat dalam kerja sama tersebut (Ikbar, 2014).

Helen Milner menjelaskan mengenai kerja sama internasional dalam beberapa hipotesis, yakni:

1. *Absolute gains, relative gains, and reciprocity hypothesis* yang melihat kerja sama sebagai sebuah kondisi maksimal para aktor untuk berinteraksi menggunakan strategi timbal balik
2. *Number of actors hypothesis* yang melihat bahwa semakin banyak aktor yang terlibat maka semakin berkurang keuntungan yang didapatkan
3. *Literation Hypothesis* yang menjelaskan kesediaan aktor untuk melakukan kerja sama dengan pertimbangan keyakinan akan ada interaksi tanpa batas.

4. *Regime Hypothesis* dimana yang bertindak sebagai fasilitator kerja sama melalui transaksi dan informasi adalah rezim
5. *Epistemic Communities Hypothesis*, dimana komunitas aktor transnasional yang memiliki keyakinan dan epistemologi dapat mempromosikan pengaturan kolaboratif.

Selain itu, Milner juga membagi konsep mengenai kerja sama internasional dibagi ke dalam dua elemen penting, yakni:

1. Asumsi bahwa perilaku aktor diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan, dimana tujuan-tujuan ini tidak harus selalu sama dengan aktor lain yang terlibat, tetapi hal ini dipandang sebagai sebuah hal yang rasional bagi aktor tersebut.
2. Kerja sama menghasilkan keuntungan ataupun penghargaan terhadap para aktor dimana keuntungan yang diperoleh para aktor ini tidak harus sama besar atau sama jenis, akan tetapi harus terjadi timbal balik (Puspitasari, 2019).

Kerja sama internasional pada dasarnya berasal dari kondisi interdependensi antar aktor atau antar negara. Interdependensi antar negara ini biasanya secara universal digambarkan melalui isu ekonomi, seperti keseimbangan dan hambatan perdagangan, nilai tukar, aset cadangan, dan ekonomi pasar kapitalis. Walaupun begitu, hal ini tidak berarti bahwa ekonomi menjadi satu-satunya aspek yang mendukung kondisi yang saling

menguntungkan antar aktor sehingga membuat negara-negara tersebut membangun sebuah kerja sama dalam kondisi yang saling ketergantungan satu sama lain. Masalah-masalah lain yang juga dapat menjadi pendorong terbentuknya kerja sama antar negara juga dapat berasal dari isu-isu seperti ekologi (polusi, populasi, pertanian), kesehatan, hingga perubahan iklim (Puspitasari, 2019).

K.J. Holsti juga memberikan pengertian mengenai kerja sama internasional. Ada lima proses kerja sama internasional yang dirumuskan oleh Holsti yang terdapat dalam jurnal yang ditulis oleh Era Riana, yakni sebagai berikut:

1. Adanya pandangan bahwa adanya beberapa kepentingan, nilai, maupun tujuan dapat saling bertemu dan menghasilkan sesuatu, dimana hal ini dapat dipenuhi dan dipromosikan oleh semua pihak sekaligus.
2. Pandangan atau harapan yang berasal dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lain akan membantu suatu negara untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
3. Persetujuan atau permasalahan-permasalahan antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan

4. Merupakan aturan yang berbentuk resmi maupun tidak resmi yang membahas mengenai transaksi masa depan yang dilaiukan untuk melaksanakan persetujuan
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Riana, 2016)

Kerangka pemahaman ini dapat menjelaskan bahwa terbentuknya suatu kerja sama internasional adalah karena adanya pemerintah yang saling mendekati satu sama lain dengan mengusulkan penyelesaian atau pembahasan masalah, mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyepakati suatu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak.

Dougherty & Pfaltzgraff mendefinisikan kerja sama internasional sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekejaran ataupun paksaan dan disahkan berdasarkan hukum (Pfaltzgraff, 1997). Suatu kerja sama dapat diawali dari adanya komitmen untuk mencapai kepentingan pribadi dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Dimana, kunci dari sebuah kerja sama sendiri ada pada masing-masing pihak yang berkomitmen dan percaya satu sama lain untuk melakukan kerja sama. Dengan demikian, poin utama dari sebuah kerja sama adalah adanya upaya pemenuhan kepentingan untuk menghasilkan keuntungan bagi pihak-pihak yang melakukan kerja sama.

Kerjasama internasional yang dibahas dalam penelitian ini adalah kerjasama yang terjalin antara Ethiopia dan *Food and Agriculture Organization* (FAO) dalam mengatasi krisis pangan yang terjadi di Ethiopia. Kerjasama ini berfokus pada upaya pemerintah Ethiopia dalam menjalankan program kerja FAO, yakni *Country Programming Framework* di Ethiopia. Dalam hal ini, FAO berupaya membantu pemerintah Ethiopia untuk menyelesaikan permasalahan krisis pangan di negaranya.

B. Food Security

Istilah ketahanan pangan atau *Food Security* muncul karena adanya krisis pangan dan kelaparan. Istilah ketahanan pangan pertama kali digunakan oleh PBB pada tahun 1971 untuk membebaskan dunia terutama negara berkembang dari krisis suplai makanan pokok dan krisis produksi. Ketahanan pangan pada saat itu berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok dan membebaskan daerah dari krisis pangan. Ketahanan pangan menurut PBB adalah ketersediaan untuk menghindari kekurangan pangan akut pada saat gagal panen yang meluas atau bencana lainnya. Definisi tersebut akhirnya disempurnakan kembali pada *International Conference of Nutrition* 1992 yang disepakati oleh pimpinan negara anggota PBB dengan menyatakan bahwa ketersediaan pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang baik dalam jumlah maupun mutu pada setiap saat untuk hidup, aktif, dan produktif (Pieris, 2015).

Maxwell mencoba menelusuri perubahan-perubahan definisi mengenai ketahanan pangan sejak *World Food Summit* pada tahun 1974 hingga pertengahan tahun 1990an. Menurut Maxwell perubahan yang terjadi pada konsep ketahanan pangan dapat terjadi pada level global, nasional, skala rumah tangga, hingga individu. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari perspektif pangan sebagai kebutuhan dasar atau *food first perspective* hingga pada perspektif penghidupan atau *livelihood perspective* dan dari indikator-indikator objektif ke persepsi yang lebih subjektif.

Maxwell dan Slatter juga turut menganalisis diskursus tentang definisi ketahanan pangan tersebut. Maxwell dan Slatter menemukan bahwa ketahanan pangan berubah sedemikian cepatnya dari fokus terhadap ketersediaan-penyediaan atau *supply-availability* ke perspektif hak dan akses atau *entitlements*. Sejak tahun 1980an diskursus global ketahanan pangan didominasi oleh hak atas pangan atau *food entitlements* serta resiko dan kerentanan atau *vulnerability* (Pieris, 2015).

Kebutuhan pangan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk di dunia. Tetapi, bertambahnya penduduk bukan satu-satunya permasalahan yang menghambat suatu negara menuju ketahanan pangan nasional. Berkurangnya lahan untuk pertanian yang diubah menjadi lahan industri dan pemukiman telah menjadi ancaman dan tantangan bagi suatu negara untuk menjadi negara yang mandiri dalam bidang pangan (Prabowo, 2010)

Ketahanan pangan merupakan permasalahan internasional dimana ketahanan pangan memiliki persoalan yang kompleks karena meliputi berbagai aspek, seperti aspek sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. *International Food Policy Research Institute* mendefinisikan ketahanan pangan ketika semua orang pada setiap saat memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, serta bergizi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka dan dapat hidup aktif dan sehat (Mardatila, 2020).

Pangan berasal dari sumber hayati produk pertanian, kehutanan, perkebunan, perairan, perikanan, dan peternakan baik hasil olahan maupun bukan hasil olahan yang ditujukan untuk membuat makanan dan minuman bagi konsumsi masyarakat, termasuk bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, dan bahan lainnya yang akan digunakan dalam proses penyiapan, pengolah, dan pembuatan makanan atau minuman. Negara memiliki kewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, serta pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan juga bergizi seimbang dengan memanfaatkan sumber daya alam, kelembagaan, dan budaya lokal (Disketapang, 2021).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai ketahanan pangan pada suatu negara adalah dengan menjalin kerjasama dengan organisasi internasional. Organisasi internasional (*international organization*) merupakan sebuah organisasi yang didirikan melalui perjanjian yang telah

diatur oleh hukum internasional. Anggota dari organisasi internasional biasanya terdiri dari negara-negara dengan pemerintah yang berdaulat dan biasa disebut sebagai *International Governmental Organizations* (IGO) tetapi seiring berkembangnya zaman sering kali aktor lain selain negara juga dapat mengajukan permohonan untuk menjadi anggota organisasi internasional dan biasanya disebut sebagai *International Non-Governmental Organizations* (NGO). Organisasi internasional berfungsi sebagai penghubung urusan-urusan antar negara tetapi tidak dimaksudkan untuk menggantikan peranan negara itu sendiri (Bakry, 2017).

Menurut Teuku May Rudy :

Organisasi internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas negara yang memiliki dasar struktur organisasi yang sudah jelas dan lengkap serta diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkelanjutan dan melembaga agar tujuan-tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan disepakati bersama antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar kelompok non pemerintah pada dasar negara yang berbeda (D.Triwahyuni, 2007).

Graham Evans dan Jeffrey Newnham mengatakan, organisasi internasional merupakan struktur lembaga formal yang melampaui batas nasional yang tercipta karena adanya perjanjian multilateral antarnegara atau bangsa. Tujuan organisasi internasional adalah untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang keamanan, hukum, diplomasi, masalah sosial, maupun dalam bidang ekonomi (Bakry, 2017).

Organisasi internasional harus memiliki sumber seperti tenaga ahli, uang, makanan, maupun persenjataan yang dapat digunakan oleh organisasi

internasional itu sendiri untuk turun langsung dan melakukan aksi dalam membantu menghadapi isu yang sedang dialami oleh suara negara (Qamara.S, 2017). Sementara itu Jan Klabbers membagi karakteristik organisasi internasional menjadi 3 bagian. *Pertama*, organisasi internasional dibuat oleh negara atau pihak yang memiliki wewenang untuk mewakili negara. *Kedua*, organisasi internasional dibentuk melalui sebuah perjanjian. *Ketiga*, organisasi internasional minimal harus memiliki organ yang memiliki kehendak yang berbeda dari kehendak negara-negara anggotanya. Jika organisasi internasional mencakup aturan-aturan atau kebijakan yang akan dilakukan oleh organisasi tersebut, sedangkan rezim internasional lebih mencakup pada norma-norma atau prinsip dan prosedur pengambilan keputusan yang biasanya bersifat implisit maupun eksplisit disekitar ekspektasi para aktor (Bakry, 2017).

Food and Agriculture Organization (FAO) sendiri merupakan salah satu contoh organisasi internasional. Organisasi ini berada dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus dalam upaya untuk mengatasi krisis pangan internasional. Tujuan dari FAO adalah untuk mencapai ketahanan pangan di dunia dan memastikan bahwa orang-orang memiliki akses pada makanan berkualitas tinggi yang cukup untuk menjalani kehidupan yang aktif dan sehat. FAO didirikan pada 16 Oktober 1945 di Kanada dan telah memiliki lebih dari 194 negara anggota (FAO, 2022).

Krisis pangan merupakan salah satu isu internasional yang masih melanda banyak negara di dunia. Krisis pangan didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang terjadi ketika seseorang tidak mempunyai akses, jumlah, serta gizi yang aman terhadap bahan pangan olahan maupun bukan olahan untuk perkembangan dan pertumbuhan yang normal agar dapat memiliki kehidupan yang sehat dan aktif (Nasyrah, 2019).

Food and Agriculture Organization (FAO) mendefinisikan krisis pangan sebagai suatu kondisi ketika terjadinya kerawanan pangan dan malnutrisi yang sangat meningkat baik di tingkat nasional maupun internasional. Kondisi ini membutuhkan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat melalui bantuan darurat (FAO, 2022). Kondisi ini disebabkan oleh perubahan iklim, konflik sosial, bencana alam dan lingkungan, serta kesulitan distribusi pangan (News, 2017).

Dalam laporan FAO “*Global Report on Food Crises*” di jelaskan bahwa penyebab terjadinya krisis pangan akut adalah ketika tingkat keparahan yang dapat mengancam kehidupan atau mata pencaharian terlepas dari penyebab, durasi maupun konteksnya. Dalam laporan tersebut, FAO menjabarkan kategori dimana kondisi dapat dikatakan sebagai krisis pangan. Fase tersebut dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut.

1. Tidak ada atau krisis pangan minim
 - a) Setiap rumah tangga bisa atau memenuhi kebutuhan pangan maupun nonpangannya tanpa harus melakukan tindakan tak lazim untuk mendapatkan penghasilan dan pangan
 - b) Diperlukannya aksi menekan risiko bencana dan membangun ketahanan pangan
2. Tertekan atau *stressed*
 - a) Setiap rumah tangga mempunyai akses untuk pangan tapi tak mampu membayar kebutuhan nonpangannya tanpa melakukan tindakan yang dapat memicu stress
 - b) Dibutuhkannya aksi untuk melindungi sumber pencaharian dan menekan risiko bencana
3. Krisis
 - a) Adanya gap dalam konsumsi rumah tangga yang dapat tercermin dari angka gizi buruk yang lebih tinggi dari biasanya
 - b) Mampu memenuhi kebutuhan pangan minimumnya tapi hanya dengan cara menghabiskan aset pentingnya
 - c) Membutuhkan tindakan sesegera mungkin agar dapat melindungi mata pencaharian dan mengurangi tingkat kesenjangan konsumsi pangan

4. Darurat

- a) Adanya gap konsumsi pangan yang berjumlah besar, digambarkan dengan jumlah malnutrisi yang sangat tinggi serta angka kematian yang sangat melampaui batas
- b) Mampu mengurangi jumlah kesenjangan konsumsi pangan tetapi dengan cara menghabiskan pendapatan yang darurat atau menjual semua aset yang ada
- c) Diperlukannya tindakan untuk menyelamatkan nyawa serta mata pencaharian

5. Bencana atau kelaparan

- a) Sangat kekurangan makanan atau kebutuhan dasar lainnya
- b) Terjadinya kemelaratan, kelaparan, kematian, serta tingkat malnutrisi akut yang sangat tinggi
- c) Diperlukan tindakan untuk mencegah kematian yang meluas serta kehancuran pada mata pencaharian

Pada laporan tersebut juga disebutkan bahwa pemicu krisis pangan adalah konflik, kejutan ekonomi contohnya efek domino pandemi Covid-19, cuaca ekstrem, wabah penyakit, perpindahan populasi yang terpaksa atau pengungsi, gangguan hama tanaman dan penyakit hewan (Emeria, 2022). Menurut Maryatin dalam jurnalnya, cara mengatasi krisis pangan dalam

jangka pendek dan menengah permasalahan mengenai krisis pangan sebenarnya berhubungan dengan 3 hal, yaitu produksi pangan, luasan lahan serta tata niaga pangan.

Namun, ketahanan pangan dapat menjadi suatu hal yang sukar tercapai jika terjadi sesuatu yang mengakibatkan kurangnya pasokan pangan ke masyarakat yang berimbas pada terjadinya krisis pangan. Penyebab dari krisis pangan terdiri dari beberapa faktor yang terjadi di suatu wilayah atau negara yang mengakibatkan terjadinya krisis pangan dan nutrisi yang berdampak pada jutaan penduduk yang mendiami wilayah negara tersebut. Berdasarkan pemaparan Harvest Help, bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya krisis pangan di negara-negara Afrika maupun negara-negara berkembang lainnya (Harvesthelp, 2012), yaitu:

1. Kekeringan dan cuaca ekstrim

Perbandingan dari krisis pangan terburuk dalam sejarah mengungkapkan bahwa seluruh kejadian tersebut diawali oleh terjadinya kekeringan atau cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah tersebut. Pada akhirnya, masyarakat mendapatkan hasil panen yang buruk atau bahkan gagal yang kemudian berakibat pada kelangkaan pangan dan tingginya harga dari makanan-makanan yang tersedia.

2. Hama, penyakit ternak, dan masalah pertanian

Sebagai tambahan dari terjadinya cuaca ekstrim yang menyebabkan kurangnya pasokan makanan, banyak panen yang gagal di Afrika maupun di negara-negara dunia ketiga yang diakibatkan oleh hama seperti belalang juta (*desert locusts*). Penyakit pada ternak maupun masalah pertanian seperti erosi dan tanah yang tidak subur juga memiliki peran dalam menciptakan krisis pangan di negara-negara tersebut.

3. Perubahan iklim (*Climate change*)

Beberapa ahli menyatakan bahwa kekeringan dan cuaca ekstrim yang terjadi di area-area yang mengalami krisis pangan dalam beberapa dekade belakangan adalah hasil dari terjadinya perubahan iklim, terutama di wilayah yang bermasalah dengan mengalami kekeringan ekstrim saat ini.

4. Konflik

Perang dan konflik memberikan dampak yang buruk dalam terjadinya krisis pangan di Afrika maupun negara-negara dunia ketiga. Terjadinya konflik memperburuk akses terhadap makanan yang mengakibatkan kelangkaan terhadap adanya makanan di suatu wilayah negara. Hal ini karena pada saat terjadinya konflik, masyarakat sulit

mendapatkan akses makanan karena situasi yang tidak kondusif dan aman.

5. Kurangnya *Emergency Plans*

Sejarah dalam terjadinya krisis pangan menunjukkan bahwa banyak negara yang benar-benar tidak mempersiapkan apapun dalam menghadapi krisis yang terjadi secara darurat dan tiba-tiba. Hal ini kemudian menciptakan sebuah kondisi dimana negara tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan mengandalkan bantuan internasional dalam menghadapi krisis pangan yang terjadi.

6. Korupsi dan instabilitas politik

Saat krisis pangan terjadi, berbagai komunitas internasional menunjukkan simpati dan perhatiannya terhadap permasalahan ini dengan memberikan dan mengirimkan bantuan dalam bentuk penyaluran makanan dan cara-cara lainnya yang dapat menyelamatkan jutaan nyawa di wilayah-wilayah yang terdampak krisis pangan tersebut. Namun, bantuan internasional seringkali tidak sampai ke orang-orang yang membutuhkan di wilayah yang terkena krisis pangan tersebut karena tingginya angka korupsi dan instabilitas politik di banyak negara-negara dunia ketiga.

7. Ketergantungan terhadap cash crops

Banyak pemerintahan di negara-negara Afrika maupun negara dunia ketiga yang mendorong produksi dari sebuah istilah yang disebut cash crops, dimana penghasilan yang didapatkan dari produksi ini digunakan untuk mengimpor makanan. Akibatnya, banyak diantara negara-negara ini yang bergantung pada cash crops memiliki resiko yang tinggi terhadap terjadinya krisis pangan karena mereka tidak memproduksi pangan yang cukup untuk memberi makan warga negaranya.

8. Penyakit yang diderita

Penyakit yang diderita oleh masyarakat suatu negara merupakan masalah serius yang menjadi perhatian bagi negara-negara Afrika sub-Sahara memperburuk krisis pangan dalam dua hal. Pertama, adanya penyakit ini mengurangi tenaga kerja yang tersedia di sektor pertanian. Kedua, hal ini memberikan tambahan beban pada rumah tangga miskin.

9. Pertumbuhan populasi yang cepat

Negara-negara Afrika maupun negara dunia ketiga yang miskin memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi yang menempatkan mereka pada resiko yang lebih tinggi terhadap krisis

pangan. Misalnya, populasi Niger meningkat dari 2,5 juta jiwa menjadi 15 juta jiwa dari tahun 1950 ke tahun 2010. Afrika juga diestimasikan hanya akan memproduksi makanan yang cukup terhadap seperempat dari total keseluruhan populasi pada tahun 2025 jika tingkat pertumbuhan penduduk terus berlanjut.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah Ethiopia dalam memanfaatkan program *Country Programming Framework (CPF) Food and Agriculture Organization (FAO)* dengan menggunakan konsep *Food Security* dan konsep mengenai Krisis Pangan. Terdapat beberapa penelitian mengenai topik serupa dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian pertama berjudul “Peran *Food Agriculture Organization (FAO)* dalam Menangani Krisis Pangan di Ethiopia” oleh Septyana Aditya. Tulisan dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana peran FAO dalam menangani krisis pangan yang terjadi di Ethiopia. Hasil dalam penelitian tersebut membahas mengenai peran FAO dalam menangani krisis pangan melalui *Country Programming Framework (CPF)* di Ethiopia yang berfokus pada tiga aspek yaitu yang pertama adalah *Crop Production*, merupakan proses akomodasi yang dilakukan FAO dengan tujuan untuk meningkatkan produk domestik dibidang pertanian dan pangan. Kedua, *Livestock and Fisheries*, merupakan

proses implementasi seperti sosialisasi kepada seluruh komponen yang tergabung dalam bidang pertanian dan pangan agar produk pertanian dan pangan dapat lebih meningkat. Ketiga *Sustainable Natural Resource Management*, yaitu membangun kembali fasilitas-fasilitas produksi pertanian dan pangan dari aspek yang bersifat fundamental, yang menyangkut teknis peningkatan ketahanan pangan dan pertanian di Ethiopia. Perbedaan penelitian tersebut dan penelitian ini adalah penelitian tersebut berfokus pada peran FAO sebagai organisasi internasional dalam menangani krisis pangan yang terjadi di Ethiopia sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus pada peran pemerintah Ethiopia dalam memanfaatkan program yang dilakukan FAO yaitu *Country Programming Framework* atau CPF dalam menangani krisis pangan yang terjadi di Ethiopia.

Penelitian kedua berjudul “*FAO’s Efforts to Tackle Food in Ethiopia (2016-2019) Based on Country Programming Framework*” oleh Jelny Tan. Tulisan dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh FAO sebagai organisasi internasional khusus makanan dan agrikultur dalam membantu Ethiopia mencapai ketahanan pangan nasional untuk warganya. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa upaya FAO menghasilkan pelaksanaan praktik pertanian berkelanjutan, peningkatan produksi dan produktivitas ternak, penilaian komprehensif terkait degradasi dan penyelesaian isu desertifikasi di Ethiopia. Disebutkan pula bahwa beberapa upaya yang dilakukan FAO merupakan solusi terhadap penyebab krisis pangan di Ethiopia. Perbedaan penelitian tersebut dan penelitian ini adalah penelitian tersebut

berfokus pada upaya yang dilakukan FAO untuk menangani krisis pangan di Ethiopia dengan program CPF pada tahun 2016-2019 sedangkan penelitian ini akan berfokus pada strategi pemerintah Ethiopia dalam memanfaatkan program CPF untuk menangani krisis pangan pada tahun 2016-2021.

Penelitian ketiga berjudul “Analisis Dampak Krisis Pangan Terhadap Human Security di Ethiopia” oleh Falhan Hakiki. Tulisan dalam artikel ini membahas mengenai dampak krisis pangan yang terjadi di Ethiopia yang mengakibatkan terganggunya human security di Ethiopia. Hasil pada penelitian ini setelah analisis yang dilakukan, krisis pangan tidak memberikan pengaruh terhadap human security di Ethiopia walaupun krisis pangan dapat mengakibatkan penyakit, malnutrisi, hingga jatuhnya korban jiwa. Perbedaan penelitian tersebut dan penelitian ini adalah penelitian tersebut lebih berfokus untuk membahas apakah krisis pangan yang terjadi memiliki dampak pada human security di Ethiopia sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi untuk menangani krisis pangan tersebut.